

Masyarakat Boleh Meminta LHP BPK

SEMARANG - Masyarakat pemeriksaan (LHP) Badan Pe-
boleh meminta laporan hasil meriksa Keuangan sepanjang



SM/Hari Santoso

TANDA MATA: Ketua BPK Harry Azhar (kiri) menerima tanda mata dari Direktur PDIH Unissula Gunarto, kemarin. (58)

memiliki tujuan jelas. Sebab sebagai dokumen negara, LHP memang tak bisa diberikan sembarangan. Hal tersebut dikemukakan Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam kuliah pakar dan halalbihalal keluarga besar KAHMI Jawa Tengah di Fakultas Hukum (FH) Unissula, Sabtu (8/8).

"Kecuali dengan alasan yang jelas. Silakan menghubungi kantor perwakilan kami. Terlebihnya kami membutuhkan surat permohonan dan identitas jelas bagi yang membutuhkannya," tutur dia. Hadir Dekan FH Unissula Jawade Hafidz, Direktur Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Prof Gunarto, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip Suharnomo, dan guru besar Ilmu Kedokteran Prof Zainal Muttaqin.

Acara itu juga dihadiri peng-

urus KAHMI dan HMI dari berbagai kabupaten dan kota di Jateng.

Pernyataan Harry tersebut menanggapi kesan masih sulitnya akses mencermati hasil audit BPK.

Pada hal publik berkeinginan ikut mencermati sejauhmana penggunaan uang negara oleh pemerintah. LHP juga bukan dokumen rahasia yang masuk pengecualian untuk tak boleh dibebaskan.

Banyak Disalahgunakan

Ketua umum PB HMI Periode 1983-1986 itu sekaligus menguraikan betapa LHP tak boleh jatuh sembarangan di tangan pihak-pihak tak bertanggung jawab. "Pada era Ketua BPK Anwar Nasution sempat ada kemudahan dalam meminta LHP BPK. Namun di era Ketua BPK Hadi Purnomo diambil kebijakan berbeda. Ini juga men-

dasari banyak keluhan dari bupati, wali kota, dan gubernur di daerah," imbuh Doctor of Philosophy (PhD) Oklahoma State University, Oklahoma, Amerika Serikat itu.

Diakuinya betapa ketika pemerintah memberi kemudahan permintaan LHP, akhirnya banyak disalahgunakan. Muncul pula sejumlah oknum yang sepertinya ingin mengambil keuntungan berdasar laporan keuangan negara.

Indikasinya sudah masuk kategori menakut-nakuti sampai pemerasan berbekal LHP. Otoritas akhirnya selektif memberikan LHP kecuali benar-benar diperuntukkan kepentingan publik. Prof Gunarto menjelaskan, penyelenggaraan dan kesuksesan acara ini ikut didukung peran mahasiswa S-3 PDIH Unissula. (H41-58)